



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : ZULKARNAEN SIREGAR
- Jabatan** : KEPALA SUBDIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN LAYANAN OPERASIONAL
- NHK** : 170521

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.824.986.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/22 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 85.736.000
- Tanah Seluas 682 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 810.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/102 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/140 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.729.250.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **756.000.000**

- MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
- MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- MOBIL, TOYOTA KIJANG KRISTA 2.0 AT Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 56.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 60.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 4.017.711.141

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 11.658.697.141

III. HUTANG

Rp. 150.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 11.508.697.141

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.